

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Intisari	ix
Abstract	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Keaslian Penelitian	18
F. Tinjauan Pustaka	23
1. Tinjauan mengenai asas cabotage	23
a. Pengertian, dasar filosofis, dan jangkauan asas cabotage	23
b. Pengaturan asas cabotage di Indonesia	32
2. Tinjauan mengenai pendaftaran kapal	36
a. Tujuan dan aliran dalam pendaftaran kapal	36
b. Sistem pendaftaran kapal di Indonesia	42
3. Tinjauan mengenai penanaman modal asing dalam perusahaan angkutan laut nasional	47
a. Pengaturan dan batasan penanaman modal asing	47
b. Perubahan kepemilikan modal asing	52
G. Metode Penelitian	57
1. Jenis Penelitian	58
2. Jenis dan Sumber Data	59
3. Tahapan Penelitian	62
4. Analisis Data	63
5. Sistematika Penulisan	64

BAB II	IMPLIKASI	INKONSISTENSI	PERATURAN	
	PERUNDANG-UNDANGAN		MENGENAI	
	PENDAFTARAN KAPAL BERBENDERA INDONESIA		PATUNGAN (JOINT VENTURE) DALAM MENDUKUNG	
	ASAS CABOTAGE		ASAS CABOTAGE	66
	A.	Implikasi Pertentangan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan Pasal 341 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran		71
	B.	Implikasi Pertentangan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo. Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 5 dan Lampiran III huruf j (Sektor Perhubungan Nomor 250 dan 251) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.....		87
	C.	Implikasi Pertentangan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo. Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.....		104
BAB III	IMPLIKASI	KEPEMILIKAN	MODAL	ASING
	PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL		PATUNGAN (JOINT VENTURE) TERHADAP STATUS	
	KAPAL BERBENDERA INDONESIA		DALAM	
	MENDUKUNG ASAS CABOTAGE.....		MENDUKUNG ASAS CABOTAGE.....	120
	A.	Pengaturan Kepemilikan Modal Asing dalam Pendirian Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan Penentuan Status Kapal Berbendera Indonesia.....		120
	B.	Implikasi Perubahan Status Perusahaan Angkutan Laut Nasional Terhadap Status Kapal Berbendera Indonesia		125

C. Implikasi Perubahan Kepemilikan Kapal Perusahaan Angkutan Laut Nasional Terhadap Status Kapal Berbendera Indonesia.....	136
D. Pembatalan Status Kapal Berbendera Indonesia	142
BAB IV BENTUK PENGAWASAN KEBERLANGSUNGAN STATUS KEPEMILIKAN MODAL ASING PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL PATUNGAN (JOINT VENTURE)	146
A. Perkembangan Pengaturan Pengawasan Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Angkutan Laut Nasional Sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	146
B. Pengawasan Keberlangsungan Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Angkutan Laut Nasional Setelah Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.....	149
1. Periode Pengawasan Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015	151
2. Periode Pengawasan Setelah Tahun 2015 sampai dengan Sekarang	166
C. Pengaturan Asas Cabotage di Negara Lain Terkait Pendaftaran Kapal oleh Penanam Modal Asing	188
BABV PENUTUP	202
A. Kesimpulan	202
B. Saran	205
DAFTAR PUSTAKA	209